



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BENY SAPUTRA**
2. Jabatan : **ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA**
3. NHK : **628516**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.140.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/69 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , WARISAN Rp. 570.000.000
3. Tanah Seluas 256 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , WARISAN Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 254 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , WARISAN Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 96 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
7. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
8. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 133.000.000
9. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA PESISIR BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
10. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA PESISIR BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
11. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 127.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	280.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	
100.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	
180.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	153.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	263.469.810
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.836.469.810
III. HUTANG	Rp.	121.250.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.715.219.810

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.